

Implementasi Program Inovasi Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan Dan Gangguan Reproduksi Sapi di Kabupaten Pinrang

Baharuddin^{1*}, Muh.Isa Ansari², Nurbiah Tahir³

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out organizational and interorganizational behavior, lower level bureaucratic behavior, and the behavior of the target group towards the success of the service program for continuous innovation in artificial insemination and cow reproductive disorders in Pinrang Regency. The research method used qualitative. The number of informants in this study was 7 people. The data collection techniques were documentation, observation, and interviews. The results of the study showed that organizational and inter-organizational behavior determine the success of implementation through improvement / strengthening of organizational structure, collaborating between organizations, developing various inter-organizational interests and actions to achieve organizational goals, in this case the government for implementing sustainable service innovation programs for artificial insemination and reproductive disorders in Pinrang Regency.

Keywords: *implementation of innovation programs, organizational behavior, lower level behavior and target group behavior*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku organisasi dan antar organisasi, perilaku birokrasi level bawah, dan perilaku kelompok sasaran terhadap keberhasilan program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku organisasi dan antar organisasi menentukan keberhasilan implementasi melalui perbaikan/penguatan struktur organisasi, melakukan kerjasama antar organisasi, mengembangkan berbagai kepentingan antar organisasi dan tindakan untuk pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah atas pelaksanaan program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang.

Kata Kunci : implementasi program inovasi, perilaku antar organisasi, perilaku level bawah dan perilaku kelompok sasaran

* baharuddin@gmail.com

PENDAHULUAN

Program Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah di dalam memecahkan permasalahan pembangunan. Termasuk salah satunya adalah permasalahan yang berkaitan di bidang peternakan, yang membutuhkan kebijakan pemerintah dalam harus memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan di bidang peternakan.

Teknologi inseminasi buatan, salah satu teknologi budidaya yang bisa memacu peningkatan populasi dan kualitas mutu genetik ternak sapi. Keturunan sapi yang dihasilkan dari teknologi inseminasi buatan merupakan persilangan dari sapi pejantan unggul. Dari segi ekonomis, anak sapi yang dihasilkan dari perkawinan alam umur 1 tahun hanya mampu dijual 4 – 5 juta/kor. Sedangkan anak sapi yang dihasilkan melalui teknologi inseminasi buatan umur satu tahun bisa mencapai harga 9 – 10 juta/ekor. Faktor lain yang menyebabkan terhambatnya peningkatan populasi adalah penyakit gangguan reproduksi sapi.

Diperlukan pendekatan program inovasi yaitu PELAN ITU BAGUS (Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi

Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi). Keunikan dan keterbaruan inovasi ini adalah pelayanan 21 hari berturut-turut dalam satu kelompok ternak disesuaikan dengan 21 hari siklus birahi sapi, sebagai syarat utama dalam keberhasilan pelaksanaan inseminasi buatan. Ini menjadi implementasi program yang melibatkan pihak antar organisasi, kelompok level bawah dan target sasaran untuk mengaktualisasikan program tersebut sebagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Pelayanan berkelanjutan dilakukan oleh petugas teknis peternakan yang tergabung dalam satu tim. Personil tim terdiri dari Dokter Hewan, Asisten Teknis Reproduksi, Pemeriksa Kebuntingan, Inseminator dan Petugas Peternakan Kesehatan Hewan Kecamatan. Tim Pelayanan bertugas memeriksa kebuntingan, pengelompokan sapi induk berdasar kepada induk bunting, tidak bunting, beranak di bawah dua bulan, dan sapi induk yang terindikasi mengalami gangguan reproduksi. Dalam kondisi normal dengan pelayanan 21 hari secara terus menerus, maka sapi induk yang tidak bunting secara keseluruhan dapat terinseminasi sesuai dengan 21 hari siklus birahi sapi.

Sebuah kebijakan berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Hal itu

disebabkan distorsi implementasi kebijakan yang merupakan isu penting bagi para implemementor untuk mengatasinya dengan harapan agar suatu desain kebijakan dapat diterapkan dengan sukses (Schnider dan Ingram, 2017).

Secara timologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak (Nawi, 2018).

Pengertian implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur: 1) proses, yaitu serangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, 2) tujuan, yaitu sesuatu yang hendak dicapai melalui aktivitas yang dilaksanakan, dan 3) hasil dan dampak yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran (Parawangi, 2018).

Kebijakan mengisyaratkan keinginan untuk berbuat sesuai struktur implementasi. Suatu desain kebijakan

yang berbeda dapat memengaruhi implementasi dalam skala lebih luas. Nugroho (2016) menyatakan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program kebijakan atau melalui langkah memformulasikan kebijakan turunan dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan publik biasanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan undang-undang atau perda yaitu suatu jenis implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan penjelasan atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana. Implementasi kebijakan tersebut secara operasional antara lain keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan dinas dan lainnya. Implementasi kebijakan ini pada dasarnya merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan (Nugroho, 2016).

Implementasi kebijakan dari suatu organisasi tidak terlepas dari serangkaian implementasi misi, visi, strategi dan cara, kebijakan, program, proyek dan kegiatan yang menghasilkan

umpan balik. Nugroho (2016) menyatakan misi adalah yang pertama karena melekat pada organisasi sebagai wujud dalam menghadirkan atau mengekskiskan sebuah kebijakan. misi yang menentukan kemana arah dari suatu visi yang melekat dalam suatu organisasi. Dari visi inilah lahir sebuah strategi yang membawa suatu organisasi mengembangkan implementasi kebijakannya yang sejalan dengan program proyek dan kegiatannya. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah suatu implementasi kebijakan yang diterakan dalam suatu organisasi mulai dari misi sampai pada pemanfaatan dari suatu proses yang memerlukan adanya umpan balik.

Inti permasalahan dalam implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan dibuat sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Untuk mewujudkan langkah tersebut diperlukan adanya implementasi kendali yang dievaluasi. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak. George Edward III dalam Sutarmin (2016) menyatakan bahwa implementasi kebijakan menjadi efektif sangat ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan

struktur organisasi. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi melaksanakan kebijakan. sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.

Implementasi program pengembangan dapat dilihat dari perilaku organisasi dan antar organisasi yaitu suatu perilaku yang ditunjukkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari kebijakan yang melibatkan antar organisasi untuk mencapai tujuannya (Quinn, 2015). Wujud perilaku organisasi dan antar organisasi tergambar pada komposisi struktur organisasi, kerjasama antar organisasi, kepentingan antar organisasi dan pencapaian tujuan antar organisasi untuk mewujudkan implementasi program pengembangan (Apter, 2017).

James (2018) menyatakan identifikasi implementasi program pengembangan dilihat dari perilaku organisasi dan antar organisasi, berkaitan dengan struktur lembaga, kerjasama yang terjadi secara berkesinambungan, kepentingan antar organisasi yang terjalin kuat dan

memiliki pencapaian tujuan yang jelas. Ini berarti, perilaku organisasi dan antar organisasi berperan penting dalam menjalin suatu hubungan perilaku organisasi dan antar organisasi.

Menurut Robbins (2014) menggambarkan konstruksi implementasi dalam program pengembangan untuk mencapai keberhasilan implementasi. Terdapat hubungan yang kuat antara struktur lembaga organisasi, kerjasama antar organisasi, kepentingan organisasi dan pencapaian tujuan organisasi.

Memahami pentingnya implementasi program pengembangan untuk menilai adanya hubungan struktur lembaga, kerjasama, kepentingan dan pencapaian tujuan lembaga sebagai suatu hubungan untuk memandang peran serta hubungan yang menjadi determinasi penting dalam mewujudkan tujuan kebijakan. Aliency (2014) menyatakan program pengembangan penting untuk mewujudkan tujuan kebijakan sebagai sebuah eksistensi bagi organisasi dalam menjalankan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Implementasi program pengembangan selanjutnya berupa perilaku birokrasi level bawah. Hendrik (2015) menyatakan implementasi program pengembangan dari perilaku

birokrasi level bawah meliputi kegiatan koordinasi, konseling, monitoring dan evaluasi. Keempat kegiatan ini merupakan wujud dari perilaku birokrasi level bawah dalam menjalankan program dan kegiatan suatu implementasi kebijakan.

Menerapkan perilaku birokrasi level bawah sangat berkaitan dengan kemampuan dari birokrasi level bawah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan untuk melakukan koordinasi dari perilaku dan tindakan yang sejalan dengan program dan kegiatan yang ingin diterapkan. Untuk memperkuat koordinasi dapat dijalankan secara optimal, diperlukan adanya konseling atau penyuluhan untuk memadukan tugas dan fungsi kerja. Setelah melakukan konseling diperlukan perilaku monitoring dari sebuah kegiatan untuk dievaluasi. Pada intinya, menurut Garbin (2017) menyatakan bahwa perilaku birokrasi level bawah adalah sebuah perilaku dan tindakan yang melibatkan lebih dari satu orang untuk berkoordinasi melakukan konseling untuk memonitoring dan mengevaluasi program dan kegiatan dari kebijakan yang diterapkan.

Mengembangkan perilaku birokrasi level bawah, secara nyata dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan dan sikap yang dilakukan oleh

orang atau sekelompok orang yang berada pada hirarki level bawah melakukan koordinasi yang sesuai dengan kegiatan penyuluhan atau konseling (dengar pendapat) untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang telah dicapai sebagai perwujudan pentingnya implementasi program pengembangan diterapkan. Marrott (2017) memberikan sebuah gambaran aktualisasi perilaku birokrasi level bawah dalam implementasi kebijakan bahwa kebijakan adalah sentral dari sebuah perilaku birokrasi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan hirarki tindakan yang dilakukan pada level bawah berupa koordinasi, monitoring dan evaluasi dari kegiatan organisasi.

Implementasi program pengembangan memerlukan adanya perilaku kelompok sasaran. Aspek kelompok sasaran yang dimaksud adalah obyek dari tindakan dan perlakuan dari program dan kegiatan suatu kebijakan yang diimplementasikan. Implementasi program pengembangan perilaku birokrasi kelompok sasaran diwujudkan melalui empat tahapan penting. Menurut Temmar (2018) ada empat perilaku kelompok sasaran: 1) melakukan advokasi pentingnya

organisasi pada kelompok sasaran; 2) memelihara hubungan keberlanjutan organisasi pada kelompok sasaran; 3) melakukan simulasi dalam pengenalan kegiatan kelembagaan pada kelompok sasaran; dan 4) mengikutsertakan kelompok sasaran dalam mencapai tujuan kegiatan.

Miller (2016) menyatakan perilaku kelompok sasaran adalah perwujudan dari sebuah tindakan atau perlakuan yang dilakukan dari kegiatan organisasi yang menghasilkan suatu advokasi, pemeliharaan, simulasi dan partisipatif untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Lebih lanjut Halvorsen (2017:72), menjelaskan proses inovasi yang diinisiasi telah menyelesaikan permasalahan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, produk dan prosedur. Mulgan dan Albury (2018:18), menyatakan bahwa inovasi yang sukses adalah merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil. Oleh karena itu inovasi telah berkembang jauh dari pemahaman awal yang hanya mencakup inovasi dalam produk (*products & services*) dan proses

semata. Inovasi produk atau layanan berasal dari perubahan bentuk dan desain produk atau layanan, sementara inovasi proses berasal dari gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologi. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan, Penyuluh Pengembangan Program PELAN ITU BAGUS, dan Masyarakat Peternak Sapi/Kelompok Ternak di kantor wilayah sentra pengembangan sapi di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.

Data sekunder yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau bahkan dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian Implementasi Program Inovasi Pelayanan Berkelanjutan

Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi di Kabupaten Pinrang. Di dalam pengumpulan data yang digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang memiliki visi dan misi. Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tiap tahunnya tertuang dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan lampiran dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan

pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan. Di samping itu, juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perkebunan telah mengimplementasikan program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi dengan berbagai organisasi yang terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, Kecamatan/Desa dan lainnya yang berkaitan dengan peternakan sapi, termasuk pula keterlibatan penyuluh peternakan yang memberikan bimbingan, pendampingan atau bantuan yang berkaitan dengan program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi kepada peternak sebagai sasaran tujuan. Implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang. Implementasi program pengembangan berdasarkan pada model implementasi perilaku organisasi dan antar organisasi, perilaku birokrasi level bawah dan perilaku kelompok sasaran. Perilaku organisasi dan antar organisasi adalah sikap dan

tindakan yang ditunjukkan pihak instansi terkait dalam implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi dalam hal ini diterapkan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang. Terdapat empat aspek yang dibangun di dalam melihat perilaku organisasi dan antar organisasi dalam melakukan implementasi program inovasi yaitu perbaikan atau penguatan struktur organisasi, melakukan kerjasama antar organisasi, mengembangkan berbagai kepentingan antar organisasi dan tindakan untuk pencapaian tujuan organisasi. Perilaku organisasi dan antar organisasi melalui perbaikan dan penguatan struktur organisasi dalam implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi, mengacu kepada Peraturan Bupati Pinrang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan. perilaku organisasi dan antar organisasi diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut kaitannya dengan implementasi program inovasi, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan IL, selaku Kepala Dinas

Peternakan dan Perkebunan untuk menanyakan perilaku organisasi dan antar organisasi dilihat dari sikap dan tindakan yang ditunjukkan dalam implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang. perilaku antar organisasi menjadi penting di dalam mengimplementasikan program ini guna memberikan perbaikan dan penguatan struktur organisasi. Aktualisasinya dengan berkoordinasi dalam melakukan inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi guna meningkatkan produksi ternak sapi. perbaikan dan penguatan struktur organisasi menjadi penting dalam mendukung keberhasilan program inovasi pelayanan berkelanjutan yang dilakukan antar organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja yang terkait. Kerjasama antar organisasi dalam hal ini kerjasama dalam melakukan budidaya dan reproduksi peternakan dengan melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pembinaan teknis, evaluasi dan analisis, pengendalian dan pengawasan terhadap budidaya dan reproduksi peternakan seperti pengembangan bioteknologi, pengembangan pembibitan dan

perkawinan (inseminasi) serta penyebaran ternak. perilaku antar organisasi masih perlu ditingkatkan dalam implementasi program pemerintah di bidang peternakan. Menjadi perlu dalam melakukan koordinasi dan kerjasama terpadu antar organisasi untuk mewujudkan peningkatan produksi ternak sapi. kerjasama antar organisasi telah diimplementasikan dalam program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi sebagai upaya untuk meningkatkan produksi hasil peternakan sapi. implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi tidak terlepas dari kepentingan yang dilihat dari unit kerja setiap bidang. Bidang Pengembangan Produksi dan Agribisnis Peternakan berkepentingan melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pembinaan teknis, evaluasi dan analisis, pengendalian dan pengawasan terhadap budidaya dan reproduksi, pajak, sarana dan prasarana serta agribisnis dan perizinan usaha peternakan. Seksi budidaya dan reproduksi peternakan berkepentingan melakukan inventarisasi, identifikasi,

pengembangan dan pembinaan teknis, evaluasi dan analisis, pengendalian dan pengawasan terhadap budidaya dan reproduksi peternakan seperti pengembangan bioteknologi, pengembangan pembibitan dan perkawinan (inseminasi buatan/kawin alami), serta penyebaran ternak. Seksi pakan, prasarana dan sarana peternakan berkepentingan dalam melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pembinaan teknis, evaluasi dan analisis, pengendalian dan pengawasan terhadap pakan, sarana dan prasarana peternakan seperti pengembangan kawasan peternakan, alat dan mesin peternakan, pemanfaatan lahan dan air, pakan dan pengolahannya serta pemanfaatan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia peternakan. Seksi agribisnis dan perizinan usaha peternakan berkepentingan melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pembinaan teknis, evaluasi dan analisis, pengendalian dan pengawasan terhadap agribisnis dan perizinan usaha peternakan seperti pembinaan dan pemberdayaan usaha, pengembangan dan pemanfaatan sumber pembiayaan/kredit program, menyusun rencana usaha agribisnis, izin rekomendasi usaha peternakan dan bimbingan penanganan panen, pasca

panen dan pengelolaan hasil pemasaran/promosi peternakan dan pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan. Selanjutnya bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan penyuluhan peternakan berkepentingan melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan penyuluhan peternakan. Seksi kesehatan hewan memiliki kepentingan melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang kesehatan hewan. Termasuk Seksi kesehatan masyarakat veteriner berkepentingan dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner. Seksi kelembagaan, ketenagaan dan penyuluhan peternakan berkepentingan dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan penyuluhan peternakan. perilaku antar organisasi perlu terus diwujudkan

sebagai sebuah kepentingan organisasi yang saling terkait dalam mengaktualisasikan implementasi program ini. Kepentingan antar organisasi diperlukan secara terpadu dalam mendukung kebijakan program inovasi pelayanan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi. pengembangan kepentingan antar organisasi telah diimplementasikan dalam program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi guna meningkatkan bobot produksi sapi dan menghindarkan penurunan reproduksi sapi. Karena itu program dinas yang disampaikan lewat penyuluhan menjadi penting untuk dikoordinasikan ada semua pihak dinas terkait.

Dalam hal pencapaian tujuan organisasi, implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang bertujuan untuk peningkatan populasi ternak sapi, peningkatan populasi ternak sapi hasil inseminasi buatan dan penurunan prevalence penyakit gangguan reproduksi ternak sapi. Peningkatan populasi ternak sapi merupakan target utama dalam pelaksanaan inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan

gangguan reproduksi sapi. Peningkatan jumlah populasi ternak sapi tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek, harus bertahap dengan program yang jelas. Inovasi awal sejak pelaksanaannya sukses memacu peningkatan populasi ternak sapi di Kabupaten Pinrang. Tahun 2014 sebelum inovasi, 22.048 ekor sapi dan setelah inovasi berjalan, jumlah meningkat pada tahun 2015 menjadi 24.313 ekor. Tahun 2016 sebanyak 25.605 ekor dan tahun 2017 menjadi 26.793, dan tahun 2018 sebanyak 28.634 ekor. Peningkatan populasi ternak sapi hasil inseminasi buatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu genetik ternak. Fokus kegiatan inseminasi buatan terangkum dalam pelaksanaan inovasi pelayanan berkelanjutan, mengurangi perkawinan sedarah (*inbreeding*) sehingga performa ternak dapat meningkat. Peningkatan populasi ternak hasil inseminasi buatan di Kabupaten Pinrang tahun 2014 sebelum inovasi dilaksanakan adalah 663 ekor. Setelah inovasi tahun 2015 ada 875 ekor, tahun 2016 menjadi 960 ekor dan tahun 2017 ada 1.149 ekor serta tahun 2018 sebanyak 1.780 ekor. Penurunan prevalence penyakit gangguan reproduksi ternak sapi dapat terwujud melalui program ini. Keberhasilan usaha ternak sapi, baik penghasil bibit (*breeding*) maupun

penggemukan (*fattening*) sangat tergantung dari kesehatan ternak, sehingga penanganan, pengendalian dan pencegahan penyakit harus menjadi prioritas utama. Status kesehatan hewan sangat berpengaruh langsung terhadap kesehatan reproduksi ternak. Kesehatan hewan harus baik untuk mencapai kesehatan reproduksi optimum. Terlihat tahun 2014, kasus penyakit gangguan reproduksi di Kabupaten Pinrang sebelum inovasi sebanyak 375 kasus, setelah dilaksanakan, tahun 2015 turun menjadi 169 kasus, tahun 2016 menjadi 83 kasus, tahun 2017 sebanyak 24 kasus dan tahun 2018 menjadi 20 kasus. dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan organisasi. Keterpaduan ini diperlukan antar instansi guna mendukung program inseminasi buatan dan gangguan reproduksi, sebagai andil dalam mendukung program pemerintah di bidang peternakan. perilaku organisasi dan antar organisasi dari pihak pemerintah telah diterapkan sesuai dengan sikap dan tindakan yang ditunjukkan dalam implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi melalui perbaikan atau penguatan struktur organisasi, melakukan kerjasama antar organisasi, mengembangkan berbagai kepentingan antar organisasi dan

tindakan untuk pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan hal tersebut dipahami bahwa implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan atas inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi telah diimplementasikan dengan baik yang ditunjukkan dengan produksi sapi yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Perilaku level bawah adalah sikap dan tindakan yang ditunjukkan dalam implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi pada tingkat level bawah dalam hal ini penyuluh peternakan. Wujud perilaku birokrasi level bawah ditentukan oleh aspek perilaku koordinasi, penyuluhan, monitoring dan evaluasi atas program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi. Perilaku koordinasi birokrasi level bawah yang dimaksud adalah adanya kegiatan yang melibatkan tim penyuluh dalam hal ini petugas pemeriksa kebuntingan dan petugas inseminasi buatan dalam pelaksanaan program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi. Koordinasi birokrasi level bawah yang dilakukan oleh penyuluh pada tingkat level rendah dengan mensosialisasikan kegiatan pembibitan dan perawatan ternak sapi

melalui pemeriksaan kebuntingan dan melakukan inseminasi buatan. Tidak dapat dihindari diantara populasi ternak sapi betina yang ada, terdapat segelintir betina yang kurang beruntung karena dikategorikan mengidap gangguan reproduksi. Sudah menjadi panggilan profesi bagi para dokter hewan, untuk memberikan solusi bagi pasiennya, melalui tindakan pembengkelan penanganan gangguan reproduksi. Untuk itu diperlukan koordinasi birokrasi level bawah oleh penyuluh dalam hal ini keberadaan dokter hewan melalui prosedur standar pemeriksaan, segera meneguhkan diagnosa. Apakah ‘pasien’ masuk kategori mengidap gangguan reproduksi permanen yang tidak mungkin disembuhkan dan berujung pada rekomendasi afkir untuk menjadi sumber daging di rumah potong. Ataukah masuk kategori mengidap gangguan reproduksi non permanen yang masih ada harapan untuk disembuhkan. Gangguan reproduksi ternak betina menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya kelahiran ternak di Indonesia. Keterbatasan tenaga medik veteriner, kurangnya kesadaran peternak untuk melaporkan kondisi ternaknya, sistem layanan reproduksi yang belum berjalan prima, merupakan penyebab masih munculnya gangguan reproduksi.

Penetapan petugas pelaksana penanganan gangguan reproduksi dilakukan dengan mengoptimalkan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) melalui identifikasi, mobilisasi sumber daya kesehatan hewan dan peningkatan kompetensi petugas puskeswan. Penerapan Inseminasi Buatan selain menghasilkan ternak dengan genetik unggul, juga membuka lapangan kerja baru bagi pemuda di pedesaan. Kebutuhan tenaga inseminator semakin meningkat meski corp pejuang reproduksi ini telah berjumlah sekitar 7.839 orang di seluruh Indonesia. Jumlah itu dirasakan masih sangat kurang dari kebutuhan ideal saat ini sekitar 12 ribuan orang. Inseminator merupakan salah satu profesi yang cukup menjanjikan di masyarakat. Dengan keterampilan layanan yang dimiliki, mampu mengambil hati dan loyalitas peternak, termasuk dengan ikhlas dan ringan memberikan imbal jasa dengan nominal yang cukup untuk menopang kebutuhan hidup inseminator bersama keluarganya. Berbeda dengan status pegawai negeri yang mempunyai batas waktu untuk berkarya. Inseminator dalam menjalankan tugasnya dapat secara terus menerus tanpa mengenal pensiun. Inseminator pada awal introduksi IB sekitar tahun 70-an sarat dengan fasilitas pemerintah.

Bahkan saat itu semuanya berstatus PNS atau honorer yang besar kemungkinan menjadi PNS. Saat itu peternak yang ternaknya akan di IB harus dibujuk dengan pemberian insentif, seperti pemberian pakan tambahan atau pengobatan cuma-cuma.

Perilaku level bawah membutuhkan berbagai masukan secara aktualisasi dari Dinas Peternakan dalam mengkoordinasikan program ini sebagai program yang harus teraktualisasikan pada level bawah. Andil pihak penyuluh dalam menjembatani kebijakan atau program pemerintah sangat penting bagi kelompok level bawah khususnya aktivitas pembimbingan, pendampingan dan pemberian kegiatan program untuk mewujudkan produksi ternak sapi. telah diimplementasikan program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi melalui koordinasi yang dilakukan pihak penyuluh di bidang peternakan untuk meningkatkan produksi hasil peternakan. Mengimplementasikan suatu program pemerintah sellau memiliki sasaran yang ingin dicapai. Perilaku kelompok sasaran yang merupakan hal terpenting dari suatu pengimplementasian kebijakan program pemerintah di dalam aktualisasinya. Kelompok sasaran yang dimaksud adalah orang yang melaksanakan dan

mendapatkan tindakan atas implementasi kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuannya. Perilaku kelompok sasaran dalam hal ini adalah para peternak yang diberikan bantuan, pendampingan dan penyuluhan yang berkaitan dengan sikap dan tindakan di dalam melaksanakan implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi dengan melalui kegiatan advokasi, pemeliharaan, simulasi dan partisipatif dalam rangka meningkatkan produksi ternak.

KESIMPULAN

Perilaku organisasi dan antar organisasi menentukan keberhasilan implementasi melalui perbaikan/penguatan struktur organisasi, melakukan kerjasama antar organisasi, mengembangkan berbagai kepentingan antar organisasi dan tindakan untuk pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah atas pelaksanaan program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang. Perilaku birokrasi level bawah mendukung implementasi program pada tingkatan penyuluh penternakan untuk menerapkan koordinasi, penyuluhan,

monitoring dan evaluasi atas program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang. Perilaku kelompok sasaran menentukan keberhasilan program yang ditujukan kepada kelompok peternak sapi sebagai sasaran penerima manfaat sesuai advokasi, pemeliharaan, simulasi dan partisipatif dalam penyelenggaraan program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang.

DAFTAR PUSTAKA

- Apter, Bresnick, 2017. *Public Administration*. London: ELBS and MacDonald and Evans.
- Aliency, Milton, 2014. *The Element of Administration Development*, Ithaca: Cornell University Press.
- Pratomosunu, S, 2015. *Kebijakan Program Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djaenuddin, 2014. *Pengembangan Kawasan Strategi yang Produktif*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Schnider, Goggin, and Ingram, Malcolm L, 2017. *Implementation Theory and Practice, Toward a Third Generation*. USA: Scott, Foresman and Company.
- Bantex, Gareth R, 2015, *Organizational Administration Theory: Text and Cases*. Addition Wesley Publishing Company, A & M University, Texas.
- Garbin, Briyan, 2017. *Autonomy in Concept and Theory of Public Policy*. Published by American Press, USA.
- Hendrik, Hermanto, 2015. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Penyunting: Darwin Muhadjir). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasker, Katz, 2017. *Foundation of Behavioral Public Policy*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- James, Perchy, 2018. *Implementation of Service Administration Public*. London: Sage.
- Indriyani, Marzuki, 2014. *Identifikasi Tantangan Administrasi Publik*. Penerbit Pustakajaya, Jakarta.